

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat, negara adikuasa demokratis dunia dengan jumlah penduduk sekitar 285 juta penduduk pada tahun 2001 dengan persebaran agama mayoritas Protestan dan Katolik, sedangkan kaum Muslim menurut penelitian dari Universitas City, New York menunjukkan angka 1,8 juta penduduk Muslim atau sekitar 0,63% pada waktu itu yang lebih rendah daripada penganut atheis atau yang tidak ingin menyebut agamanya sebesar 14%. Demografi agama di Amerika Serikat memang tidak mudah karena pemerintah Amerika Serikat sendiri dengan liberalisasinya tidak menggunakan acuan agama dalam persebaran penduduk yang menandakan adanya asas kebebasan dalam memeluk agama apapun. Hal ini selaras dengan amandemen pertama dalam Bill of Rights Amerika Serikat yang berbunyi “Kongres tidak akan membuat undang – undang yang menyinggung pembentukan agama, ataupun melarang kebebasan pelaksanaannya; atau membatasi kebebasan berbicara, atau kebebasan pers; atau hak – hak rakyat untuk berkumpul secara damai, dan mengajukan petisi kepada pemerintah agar menanggapi keluhan.” yang dikenal sebagai Klausul Pembentukan (Establishment Clause), ini berarti pemerintah dilarang untuk menetapkan suatu agama tertentu sebagai agama resmi baik itu di tingkat negara ataupun tingkat negara bagian untuk menjaga kerukunan antar umatarganya. Amerika menjunjung tinggi keberagaman dalam beragama, namun mereka juga tetap membatasi aksi religi yang terlalu ekstrem untuk menjaga kenyamanan antar umat di tempat publik tetapi mendukung bila yang dilakukan adalah

aksi penggalangan dana (charity) yang melibatkan multi agama. Keberadaan segala macam agama di Amerika Serikat diharapkan dapat terjaga eksistensinya tidak ada tumpang tindih maupun intervensi dari pihak manapun. Di samping kebebasan dalam beragama, di dalam Bill of Rights, Amerika juga menjamin warganya untuk mendapat jaminan keamanan dan kesetaraan dalam hukum bagi warga Amerika.

Disamping Bill of Rights, dalam rangka menjamin kebebasan individu warga negara Amerika diikrarkan pula pidato Four Freedoms yang dibacakan oleh Presiden AS ke 32, Franklin D. Roosevelt di depan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada 6 Januari 1941 yang berisi agar manusia dijamin negara dalam empat kebebasan: kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan beribadah kepada Tuhan dengan cara masing – masing, hak untuk bebas dari kekurangan dan kemiskinan, serta kebebasan dari ketakutan. Ide tersebut kemudian berkembang menjadi Atlantic Charter pada Agustus 1941, deklarasi PBB 1 Januari 1942, dan deklarasi universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948. Meskipun perihal agama serta ibadah bukan menjadi yang pertama dalam The Four Freedoms, tetapi disini kebebasan dalam beragama beserta segala ritualnya telah dijamin bahkan hingga tingkat PBB, hal ini juga mengacu pada amandemen pertama di atas yang membahas tentang keragaman agama berikut kebebasannya.

Amerika Serikat merupakan negara yang liberal, menurut Louis Hartz Amerika Serikat ini adalah negara dengan liberalisme murni karena tidak melewati masa – masa feodalisme. Karena sudah “terlahir liberalis”, warga negara Amerika Serikat menurut Hartz dinilai sebagai warga yang hampir secara seragam berdedikasi untuk “kebebasan sosial atomistik”, doktrin yang melibatkan komitmen terhadap etika para individualis, ketidaksukaan terhadap kekuasaan negara, skeptik terhadap kaum elit sosial, dan perasaan bangga atas kesetaraan sosial. Liberalisme inilah yang melekat pada diri Amerika Serikat dan dijaga tradisinya terus – menerus. Liberalisme yang digunakan Hartz dalam melihat Amerika ini kental akan paham Lockeanisme, paham dari filsuf Inggris John

Locke. Menurut Locke, kesetaraan adalah alamiah bagi manusia karena semua manusia memiliki kepemilikan yang sama, yaitu tenaga kerja. Kebebasan lebih disukai daripada autoritarianisme karena pemerintahan terbaik adalah mereka yang memenangkan perjanjian dengan rakyat. Tradisi ini dikenal dengan tradisi “Kontrak Sosial” di mana individu yang memegang kebebasan sendiri. Kemudian negara mendapatkan kekuasaan dari individu tersebut melalui “kontrak” di mana individu - individu yang menjadi warga negara memberikan sedikit kebebasannya kepada negara untuk menjamin kebebasan seluruh masyarakat dihargai dan diamankan, seperti sebuah tindakan toleransi. Hal ini menandakan juga bahwa toleransi beragama di antara masyarakat merupakan gagasan bagus karena keimanan yang berasal dari kemauan sendiri akan lebih kuat daripada keimanan yang dipaksa. Meskipun liberalisme menjamin kebebasan bagi setiap individu, tetapi mereka juga harus dapat mempertanggungjawabkan kebebasan tersebut dengan cara “menyumbang” kebebasan itu untuk seluruh warga agar menjamin semua warga memiliki hak yang sama dan tidak terjadi kepemihakan sebelah.

Kebebasan di Amerika Serikat telah diatur dalam konstitusinya dengan proses yang telah disiapkan secara matang dan panjang, disepakati melalui traktat, dan ditetapkan secara legislatif melalui Kongres, badan perundang – undangan negara bagian, dan plebisit (referendum negara bagian). Sebagai negara besar yang terlahir dengan liberalis, sudah menjadi akar bahwa kebebasan menjadi pokok utama di Amerika Serikat tetapi dalam perjalanannya tidak dapat serta merta melakukan asas kebebasan itu secara terus menerus dan penuh, perlu sebuah kontrol untuk menjaga kebebasan yang pada hakikatnya tidak dimiliki seorang individu saja melainkan milik semua warga negara. Dalam hal ini yang mengontrol tersebut adalah individu (masyarakat) karena mereka yang terjun langsung dalam kehidupan sosial seperti disebutkan dalam paham Lockeanisme di atas bahwa individu yang memegang kendali atas kebebasan. Lantas pemerintah tidak diam saja melihat hal tersebut meskipun tidak dapat terlalu jauh turun tangan tetapi pemerintah melalui Bill of Rights dan yang tercantum dalam

pidato Four Freedoms, Amerika Serikat telah menjamin kebebasan warga negaranya di segala aspek. Itu merupakan langkah maksimal yang dapat dilakukan pemerintah Amerika Serikat dengan menciptakan kedamaian bersama, pemerintah dalam hal ini hanyalah sebagai pengawas menjaga agar kebebasan itu dimiliki semua warganya, tidak lebih tidak kurang.

Dalam perjalanannya sebagai negara besar yang maju yang demokratis, sebuah ujian berat dialami negara ini. Sebuah serangan teroris menghantam sektor vital di Amerika Serikat, penyerangan gedung WTC dan Pentagon yang kemudian dikenal dengan peristiwa 9/11.

Sebuah serangan besar pada 11 September 2001 menyerang gedung WTC dan Pentagon yang pada akhirnya diketahui sebagai sebuah aksi serangan teroris. Rangkaian serangan ini dimulai pada pukul 08.46 waktu setempat saat sebuah pesawat jet menghantam Twin Towers WTC dengan kecepatan 700km/jam yang kemudian disusul serangan serupa ditempat yang sama 20 menit kemudian. Ketika area WTC masih dalam kepanikan, kelompok teroris ini menyerang Pentagon yang dikenal sebagai bangunan teraman di dunia. Tidak lama setelah invasi Pentagon, pesawat komersil United Airlines didaratkan secara paksa di sekitaran Shanksville karena adanya dugaan penyerangan ke White House. Akibatnya, sekitar 3000 korban jiwa melayang dan 6000 luka – luka. Selang beberapa jam, FBI berhasil menemukan nama – nama dari pilot dan pembajak pesawat yang memunculkan dugaan bahwa dalang aksi tersebut berasal dari kelompok al – Qaeda. Hal inilah yang kemudian Amerika Serikat menetapkan “siaga 1” terhadap pelaku teror ini beserta kelompoknya, namun hal ini sedikit banyak menjadi boomerang bagi Amerika Serikat karena dengan penetapan tersebut secara tidak langsung Amerika menyerang kelompok al – Qaeda yang kebetulan merupakan kelompok Islam di mana Islam di Amerika Serikat adalah minoritas, hal ini akan mengubah pandangan terhadap Islam di Amerika Serikat.

Akibat serangan ini, muslim yang sudah menjadi minoritas seperti tertekan kehidupannya di Amerika. Mereka sebelum serangan sebenarnya dapat hidup seperti layaknya mayoritas penduduk di Amerika dalam artian tidak ada perilaku berlebih terhadap muslim tidak ada yang salah tidak ada masalah terhadap kaum muslim di Amerika Serikat. Namun, semenjak Amerika mengambil tindakan tegas ini opini dari masyarakat mulai menganggap muslim dengan stigma negatif dan muslim sebagai teroris salah satunya. Opini negatif tersebut menjadi asal muasal lahirnya Islamophobia di Amerika Serikat yang berbuntut tindakan diskriminasi di Amerika Serikat serta beberapa negara lain dengan muslim sebagai minoritas. Hal ini cepat sekali menyebar karena Amerika Serikat dianggap sebagai negara besar yang demokratis sehingga banyak orang yang memercayainya.

Beberapa aksi diskriminasi di Amerika sangat menyusahakan bagi umat muslim terlebih yang mereka menjaga betul adat istiadat Islam, seperti beberapa perempuan muslim harus melepas jilbab maupun cadarnya untuk menghindari kekerasan baik fisik maupun psikis yang timbul dari adanya rasa takut berlebih terhadap Islam yang dikaitkan dengan aksi teroris. Tindakan diskriminasi juga terjadi pada muslim laki – laki yang mengenakan jenggot sebagai Sunnah dalam Islam, mereka sampai rela mencukur janggutnya agar dapat bermasyarakat dan berbaur dengan warga non muslim Amerika lainnya, hal itu dilakukannya agar dapat menciptakan rasa nyaman dan aman bagi warga mayoritas Amerika sehingga tidak ada rasa khawatir bagi semua pihak. Bahkan, tidak hanya dari sesama warganya yang mendapatkan tindakan diskriminasi ini, tetapi dari media juga mendeskreditkan Islam sebagai teroris seperti dalam sebuah acara talkshow di Amerika Serikat yang mendatangkan seorang tamu dengan mengenakan jubah panjang seperti layaknya orang Arab dan kental dengan nuansa muslim langsung dicap sebagai teroris dan menjadi bahan candaan bagi para pengisi acara tersebut. Mirisnya, hal ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat saja, di Korea hal serupa juga terjadi saat di sebuah acara TV talkshow komedi mendatangkan seorang dengan jubah panjang dengan membawa senjata api

yang menguatkan image Islam dan Timur Tengah sebagai teroris. (Kedang, 2017)

Identitas dalam Islam sebetulnya tidak memiliki patokan yang kaku, muslim di manapun dapat fleksibel mengekspresikan busananya dan perilakunya seperti yang terjadi secara umum di tempat di mana Islam menjadi minoritas. Mereka yang mengenakan cadar maupun jubah panjang menurut penulis adalah cerminan daripada budaya Timur Tengah dan bukan Islam secara garis besar, bila yang terjadi di dunia seperti ini memanglah kita mengikuti arus yang ada namun tetap berpegang teguh pada pondasi yang sudah tertanam dalam dogma Islam. Seperti dalam opini John Locke bahwa kita harus sedikit “menyerahkan” kebebasan diri sendiri demi kepentingan bersama untuk menciptakan kedamaian.

Melihat tragedi 9/11 tersebut, pemerintah Amerika Serikat di bawah komando Bush langsung mengeluarkan kebijakan – kebijakannya dengan cepat untuk mengantisipasi serangan teroris di kemudian hari. Salah satu kebijakannya adalah diberlakukannya *Secondary Security Screening Selection* (S4), yang merupakan pengecekan mendalam terhadap beberapa orang yang akan melakukan penerbangan baik dari Amerika Serikat maupun yang akan masuk AS. Disamping ditujukan untuk orang yang akan melakukan mobilisasi, di dalam S4 juga memuat daftar nama – nama yang sudah ada dalam blacklist S4 dan yang akan masuk daftar ini adalah nama – nama yang mengandung unsur Islam di dalamnya. Mereka yang masuk dalam S4 akan mengetahui dirinya terdaftar di blacklist akan tercetak di *boarding pass* mereka saat di bandara dan tidak dapat melakukan check in secara online, di bandara mereka yang terdaftar dalam S4 akan diperiksa secara terpisah dengan penumpang lainnya serta diperiksa secara mendalam semua barang bawaannya kemudian diwawancarai tentang bagaimana latar belakang penumpang, pengecekan riwayat kartu kredit, hingga alasan melakukan penerbangan tersebut yang akan memakan waktu tidak sebentar sehingga akan menghambat mereka yang akan melakukan penerbangan. S4 akan diberlakukan bilamana suatu penumpang

yang akan masuk maupun keluar AS mencakup ciri – ciri sebagai berikut:

- a. Jadwal penerbangan yang tidak biasa, meliputi pemesanan tiket pesawat di menit – menit akhir menuju waktu *boarding* pesawat, tiket internasional satu arah, dan perjalanan yang berhubungan dengan “zona merah” AS
- b. Adanya nama – nama yang mengandung unsur Islam meskipun mereka bukanlah seorang muslim
- c. Penumpang yang membayar tiketnya secara tunai

Zona merah merupakan negara – negara yang dianggap memiliki kepentingan khusus oleh Amerika Serikat dan berjumlah 35 negara dari West Bank dan beberapa negara yang terletak di Jalur Gaza. (Checkpoint Identity & Travel Intelligence, 2011)

Pelaksanaan S4 pun masih berlangsung hingga saat ini ketika beberapa warga yang tergolong masuk dalam S4 ini kerap mengeluhkan regulasi yang mempersulit mereka melakukan mobilitas internasional. Mereka yang masuk dalam S4 juga sudah menggandeng beberapa aktivis HAM dan Pusat Hak – hak Konstitusional tetapi tetapi mereka tidak dapat berbicara banyak karena peraturan ini semenjak dicanangkan orde Bush hingga sekarang tidak mendapat gubahan apapun. Padahal jika menilik kembali dalam Konstitusi Amerika Serikat di mana mereka menekankan tidak menetapkan suatu agama sebagai agama resmi yang berarti tidak ada intervensi terhadap suatu agama tertentu, AS juga mengedepankan asas kebebasan mereka dalam memeluk suatu agama dan menjalankan ibadahnya dengan tenang.

Tetapi, hadirnya kebijakan S4 justru menekan pemeluk agama dalam hal ini Islam dalam kebebasannya bukan dalam beribadah namun dalam bermasyarakat. AS seolah mengisolasi keberadaan Islam di dalam negaranya dan hal ini berbau diskriminasi terlebih melihat kriteria S4 yang salah satunya bahwa calon penumpang dengan nama yang mengandung unsur Islam akan dikenai pemeriksaan ekstra. Keberadaan Islam di AS hingga saat ini pun masih menjadi suatu kekhawatiran

meskipun sudah belasan tahun tragedi yang membuat kebijakan ini ada sudah berlalu. Jika Amerika Serikat ingin mengembalikan asas kebebasannya dan tidak ada diskriminasi, maka pemerintah harus memulai langkah terlebih dahulu karena pemerintah memiliki kuasa dan dapat menciptakan berbagai stereotype apapun.

Amerika Serikat sendiri sudah jelas memiliki dasar prinsip akan demokrasi dan kebebasan yang matang bahkan tercantum dalam dasar konstitusinya yang menjamin kebebasan semua umat beragama dalam beribadah, menjamin keamanan pula bagi seluruh masyarakat, dan pemerintah tidak akan mencampuri perihal agama dalam pembuatan suatu kebijakan. Tetapi dalam kebijakan S4 ini pemerintah seolah telah “berkhianat” kepada dirinya sendiri dengan adanya unsur agama di dalam kebijakan yang dibuat pemerintah serta mengekang kebebasan individu. Pelanggaran terhadap prinsip – prinsip demokrasi dan hak kebebasan individu jelas adanya terutama bagi umat muslim di AS yang tidak dapat melakukan mobilisasi di negaranya sendiri dengan tenang. Hingga saat ini pun kebijakan ini masih berlaku melihat dari banyaknya penumpang pesawat yang mengeluhkan tidak tercetaknya boarding pass mereka hingga pemeriksaan yang merepotkan karena terganjal kebijakan tersebut. Pihak penerbangan Amerika Serikat mengklaim bahwa tidak ada anak di bawah umur dalam list S4 mereka tetapi pada Juli 2017 lalu terdapat anak di bawah umur berada dalam daftar tersebut dan harus melalui serangkaian proses S4 itu. *Secondary Security Screening Selection* ini telah membuat Amerika Serikat keluar dari jalurnya dan melanggar prinsip – prinsipnya sendiri.

B. Rumusan Masalah

Mengapa Amerika Serikat di bawah Bush menerapkan kebijakan *Secondary Security Screening Selection* yang melanggar prinsip – prinsip Amerika Serikat?

C. Kerangka Teori

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan teori sebagai berikut:

Teori Psikoanalisis

Teori ini dipelopori oleh Sigmund Freud seorang ilmuwan psikologi asal Moravia pada tahun 1896. Freud memahami individu dengan pandangan yang berbeda saat itu di mana jiwa individu yang terlihat digambarkan sebagai sebuah gunung es di lautan bahwa yang terlihat hanyalah puncak kecilnya saja, tetapi jauh di bawah lautannya berdiri kokoh gunung es tersebut yang dianalogikan sebagai ketidaksadaran yang tak terlihat dari individu. Ketidaksadaran yang sangat luas ini ditemukan dorongan – dorongan, nafsu – nafsu, ide – ide dan perasaan – perasaan yang ditekan ke dalam alam bawah sadar yang berisi kekuatan – kekuatan vital dan tak kasat mata yang mengontrol pikiran dan perbuatan sadar individu.

Psikonalisis adalah teori yang menekankan bahwa individu bergerak melewati tahapan yang pasti selama tahun – tahun awal perkembangannya dan erat hubungannya dengan sumber – sumber kesenangan. Teori ini memperkenalkan konsep ketidaksadaran sebagai bagian kepribadian, di mana terletak sebuah keinginan, impuls – impuls genetic (insting), pengaruh energi libido, pengaruh irasionalitas, serta pengalaman masa lalu yang dapat mempunyai pengaruh langsung pada tingkah laku individu. Tingkah laku individu ini pada dasarnya dipengaruhi atau dimotivasi oleh determinan kesadaran maupun ketidak sadaran. Sedangkan, di era modern psikoanalisis ini memiliki definisi pengetahuan psikologi yang menekankan pada dinamika, faktor – faktor psikis yang menentukan perilaku manusia, serta pentingnya pengalaman masa kanak – kanak dalam membentuk kepribadian masa dewasa. Teknik yang khusus menyelidiki aktivitas ketidaksadaran (bawah sadar). (Hall & Lindzey, 1993)

Penerapan psikoanalisis dalam studi politik pertama kali dilakukan oleh Harold Laswell pada awal 1930 an. Laswell

mengajukan argument bahwa perilaku politik adalah hasil dari upaya kepribadian aktor politik memproyeksikan dirinya pada suatu obyek publik dan kemudian merasionalisasikan tindakan itu dengan dalih kepentingan publik. Contohnya adalah seorang anak yang dalam masa pertumbuhannya menyimpan kebencian mendalam terhadap ayahnya yang dingin dan kerap mengekang. Di saat yang sama, dari lingkungan kulturalnya dia mendapati bahwa membenci orang tua sangat dilarang secara moral. Akibatnya anak tersebut mengalami ketegangan psikologik yang terus menerus. Menurut Laswell, untuk menghilangkan ketegangan tersebut, individu itu akan menumpahkan kebencian itu pada objek lain seperti pemerintah karena merupakan sumber wewenang yang paling jelas. Hal ini diambil secara psikologik fungsional karena kebutuhan membenci sudah terpenuhi tanpa harus melanggar norma. Tetapi menurut Laswell, kebencian yang irasional (kebencian terhadap ayahnya yang terganjal norma) ini harus menjadi sesuatu yang masuk akal (sesuatu yang sadar dan memiliki tujuan) sehingga anak tersebut membenci pemerintah. Penyebab membenci pemerintah dalam contoh tersebut menurut Freud berada pada tingkat di bawah sadar karena terbentuk dari pengalaman masa lalu. Tidak mungkin anak tersebut membenci pemerintah karena dia membenci ayahnya, hal tersebut tidak dapat diterima oleh kalangan banyak. (Mas'ood, 1989)

Contoh tersebut menggambarkan perubahan dari apa yang sebenarnya mendasari suatu tindakan bawah sadar menjadi suatu tindakan dengan alasan yang rasional yang seolah – olah memiliki tujuan tertentu. Inilah yang disebut Laswell sebagai rasionalisasi, apa yang nampak sebagai penerimaan suatu ideologi politik secara sadar sebenarnya adalah suatu upaya kepribadian untuk meredakan sebagian dari ketegangan psikologik internalnya.

Dalam menganalisis Bush terhadap kebijakan *Secondary Security Screening Selection* yang dibuatnya penulis akan menurunkan tingkat analisis menjadi tingkat individu dengan teori psikoanalisis karena bahwa negara – negara bangsa tidak melakukan tindakan, yang melakukan adalah para

pemimpinnya. Alasannya adalah bahwa keterlibatan seseorang tertentu dalam suatu situasi menimbulkan akibat yang berbeda, seperti ketika Bush mengeluarkan reaksi yang tidak seperti kebiasaan Amerika Serikat dalam menanggapi peristiwa 9/11. Alasan lain adalah karena para teoretisi percaya bahwa kekuatan besar yang mendorong dinamika politik internasional pada akhirnya datang dari hakekat manusia yang paling dalam. Kemudian adanya pengalaman Bush ketika Bush senior menjabat menjadi presiden dan menangani masalah Saddam Hussein yang pada akhirnya mengkonstruksi persepsi Bush junior terhadap aktor muslim dan Timur Tengah.

Di dalam kasus Bush mencanangkan kebijakan S4 yang diskriminatif ini, beliau terpengaruh oleh dendam dengan al Qaeda akibat serangan *Black September* yang berakibat Bush mencap ciri – ciri yang melekat pada al Qaeda sebagai generalisasi akan sebuah actor teror sehingga persepsi teroris tersebut melebar ke umat muslim di AS karena memiliki ciri yang sama seperti al Qaeda. Persepsi yang timbul ini bersifat dinamik namun dapat memainkan peran dalam menentukan perilaku suatu negara. Ole R. Holsti menyebutkan para pembuat keputusan sama halnya seperti manusia lain, dipengaruhi oleh berbagai proses psikologik yang memengaruhi persepsi (misalnya untuk mempertahankan pendapat diri sendiri atau untuk mengurangi kecemasan) dan proses psikologik lain yang membentuk kepribadiannya.

Hal ini pula yang terjadi pada Bush dalam mengeluarkan kebijakan diluar kebiasaan Amerika Serikat, adanya proses psikologik yang terjadi dalam diri Bush yang memengaruhinya dalam membuat kebijakan bahkan bila melihat situasi yang terjadi, Bush berada di bawah tekanan kecemasan sehingga cara – cara ekstrem pun ditempuh untuk menghilangkan tekanan. Cara tersebut disebut mekanisme pertahanan (*defence mechanism*), hal ini ditempuh Bush untuk melindungi dirinya dari hal – hal yang bila dibiarkan akan membuat dirinya resah dan cemas. Mekanisme pertahanan inipun memiliki 5 pertahanan pokok, yaitu:

- a. Represi

Ini merupakan salah satu konsep paling awal dalam psikoanalisis. Sebelum Freud sampai pada perumusan akhirnya tentang teori kepribadian dengan konsep – konsep id, ego dan superego, Freud membagi jiwa menjadi tiga wilayah: kesadaran, pra – kesadaran, dan ketidaksadaran. Pra – kesadaran berisikan bahan psikologis yang dapat menjadi sadar saat diperlukan. Akan tetapi ketidaksadaran oleh Freud dipandang relative tidak terjamah oleh kesadaran; isi kesadaran tersebut ada dalam keadaan represi.

b. Proyeksi

Kecemasan realitas biasanya lebih mudah ditanggulangi oleh ego dibandingkan kecemasan neurotic atau kecemasan moral. Karena itu apabila sumber kecemasan seseorang bisa ditemukan di dunia luar dan bukan pada ancaman – ancaman suara hatinya, maka orang itu akan lebih mudah menghadapi keadaan cemas itu. Mekanisme yang digunakan untuk mengubah kecemasan moral menjadi ketakutan objektif ini disebut proyeksi.

c. Pembentukan Reaksi

Tindakan defensive ini berupa menggantikan suatu kecemasan dengan lawan atau kebalikannya dalam kesadaran. Misalnya, benci diganti dengan cinta. Impuls atau kecemasan aslinya tetap ada tetapi tertutup atau tersembunyi dibalik suatu impuls lain yang tidak menimbulkan kecemasan.

d. Fiksasi

Suatu kepribadian akan melewati serangkaian tahap yang cukup jelas sampai mencapai kematangan. Akan tetapi, setiap langkah baru yang ditempuh mengandung frustrasi dan kecemasan dalam taraf tertentu dan apabila frustrasi dan kecemasan ini terlalu besar, maka perkembangan yang normal bisa terhenti untuk sementara atau seterusnya. Proses yang terhenti inilah yang disebut dengan fiksasi.

e. Regresi

Disini, seseorang yang mendapatkan pengalaman – pengalaman traumatic kembali ke suatu tahap perkembangan yang lebih awal. Arah regresi biasanya

ditentukan oleh fiksasi – fiksasi yang pernah dilakukan oleh orang yang bersangkutan sebelumnya. Apabila mereka bergantung seperti waktu masih kanak – kanak, maka mereka akan menjadi tergantung lagi manakala kecemasan mereka meningkat sampai ke taraf yang tak tertanggungkan. (Hall & Lindzey, 1993)

Alasan psikologis inilah yang mendasari Bush dalam pembuatan kebijakan *Secondary Security Screening Selection* seperti adanya dendam dengan al Qaeda, persepi terhadap muslim, pengalaman masa lalu, dan kecemasan pribadi Bush.

D. Hipotesis

Presiden George Walker Bush mengeluarkan *Secondary Security Screening Selection* karena adanya faktor psikologis yaitu psikoanalisis yang dipengaruhi oleh persepsi, kondisi dan pengalaman masa lalu Bush sebagai individu serta defence mechanism yang diperoleh dari proyeksi dan represi.

E. Tujuan

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk menjelaskan kebijakan *Secondary Security Screening Selection*

F. Jangkauan Penelitian

Skripsi ini akan menelaah pada kebijakan George W. Bush yaitu *Secondary Security Screening Selection* tentang latar belakang pembuatan kebijakan tersebut dan dampak yang ditimbulkan dari munculnya kebijakan tersebut. Kebijakan ini hadir pasca penyerangan gedung WTC dan Pentagon pada 2001 oleh teroris yang dikenal dengan peristiwa 9/11 dan akan penulis fokuskan pada masa pemerintahan Bush. Subyek yang akan menjadi perhatian dalam kasus ini yaitu Bush sebagai pengagas kebijakan *Secondary Security Screening Selection*.

G. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data – data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dokumen, berita, rekaman wawancara dari media yang dipublikasikan dan beberapa media elektronik maupun cetak lainnya yang mana akan terjalin harmonisasi antara satu dengan yang lain.

2. Teknik Analisa Data

Dalam metode kualitatif, penulis menggunakan metode analisa data dengan analisis dokumen dengan maksud untuk melengkapi data yang dimulai dengan tahapan memeriksa kelengkapan data dengan justifikasi agar data yang terkumpul dapat dikatakan layak. Kemudian penulis akan melakukan klastering berdasarkan sumber yang berasal dari dalam maupun luar negeri serta relevansi data agar mendapatkan data yang kuat serta memudahkan dalam pengaplikasiannya. Setelah semua data terkumpul dan terklasifikasi dengan tepat, maka penulis melakukan analisis data untuk menemukan sebuah pola yang sistematis.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan berisikan 4 bab terdiri dari:

Bab I. Merupakan Bab Pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesis, Tujuan, Jangkauan Penelitian, Metodologi yang memuat Jenis Penelitian dan Teknik Analisa Data, serta Sistematika Penulisan.

- Bab II. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai identitas nilai dan prinsip Amerika Serikat. Kemudian kronologi tragedi 9/11 dan kebijakan *Secondary Security Screening Selection*.
- Bab III. Bab ini akan menjelaskan latar belakang presiden Bush dalam penerapan kebijakan *Secondary Security Screening Selection* yang melanggar prinsip dan identitas Amerika Serikat.
- Bab IV. Kesimpulan.

